



Indeks Kerawanan Pemilu 2019

Jakarta, 25 September
2018

Latar Belakang

- Amanat UUD RI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) butir a:
“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”
- Amanat UU No 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) butir a:
“Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, Bawaslu bertugas: Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu”



Tujuan

Tujuan IKP 2019

1. **Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan**
2. **Alat pemetaan, Pengukuran potensi, Prediksi, dan Deteksi Dini**
3. **Rekomendasi penyusunan strategi pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu kepada *stakeholders* Pemilu.**



Konsep IKP

DEFINISI KONSEP KERAWANAN PEMILU

“Segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar.”

**“DALAM KONTEKS PEMILU
SERENTAK, IKP 2019
MEMBANDINGKAN TINGKAT
KERAWANAN ANTAR
KABUPATEN/KOTA SELURUH
INDONESIA”**

4 Dimensi:

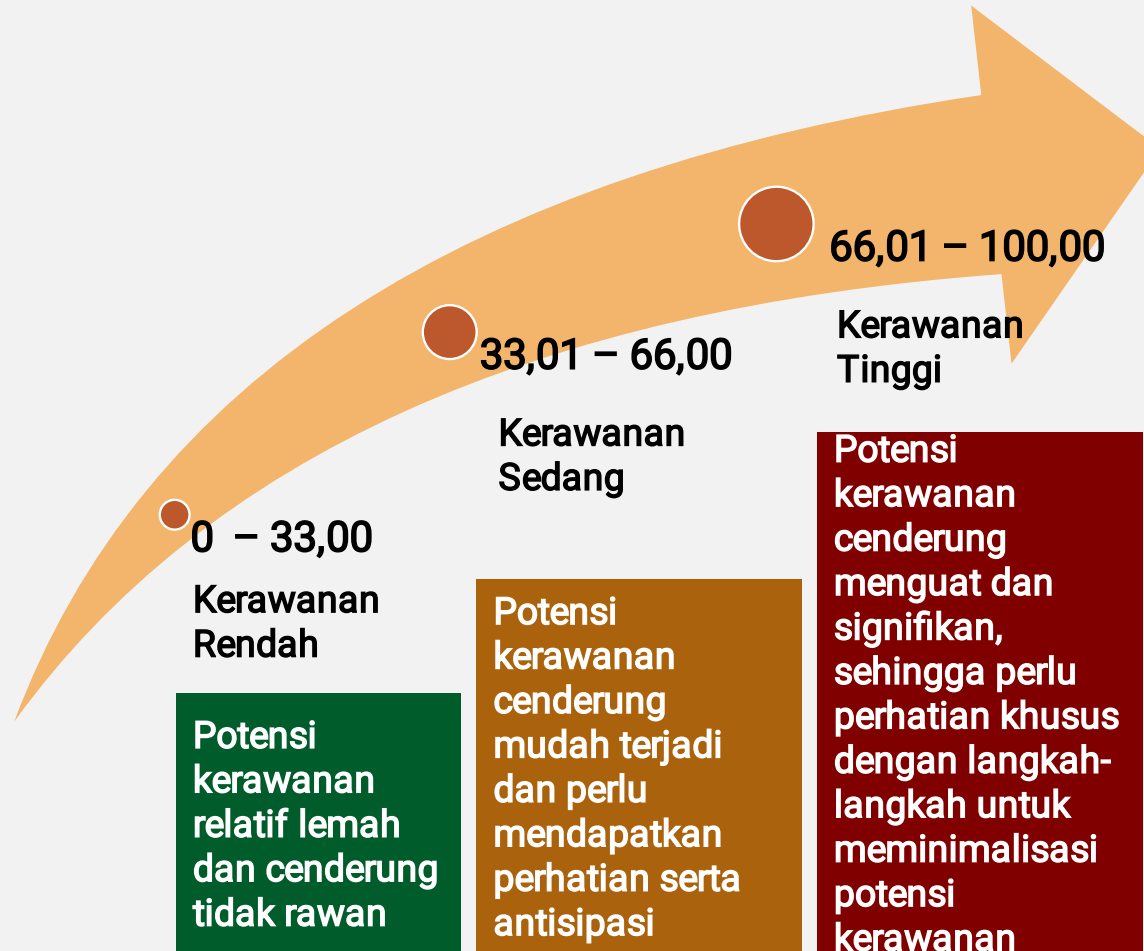
1. Dimensi Konteks Sosial Politik
2. Dimensi Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil
3. Dimensi Kontestasi
4. Dimensi Partisipasi


16 Subdimensi:

1. Subdimensi Keamanan
2. Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu
3. Subdimensi Penyelenggara Negara
4. Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal
5. Subdimensi Hak Pilih
6. Subdimensi Kampanye
7. Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara
8. Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu
9. Subdimensi Pengawasan Pemilu
10. Subdimensi Hak Politik terkait Gender
11. Subdimensi Representasi Minoritas
12. Subdimensi Proses Pencalonan
13. Subdimensi Partisipasi Pemilih
14. Subdimensi Partisipasi Partai
15. Subdimensi Partisipasi Kandidat
16. Subdimensi Partisipasi Publik



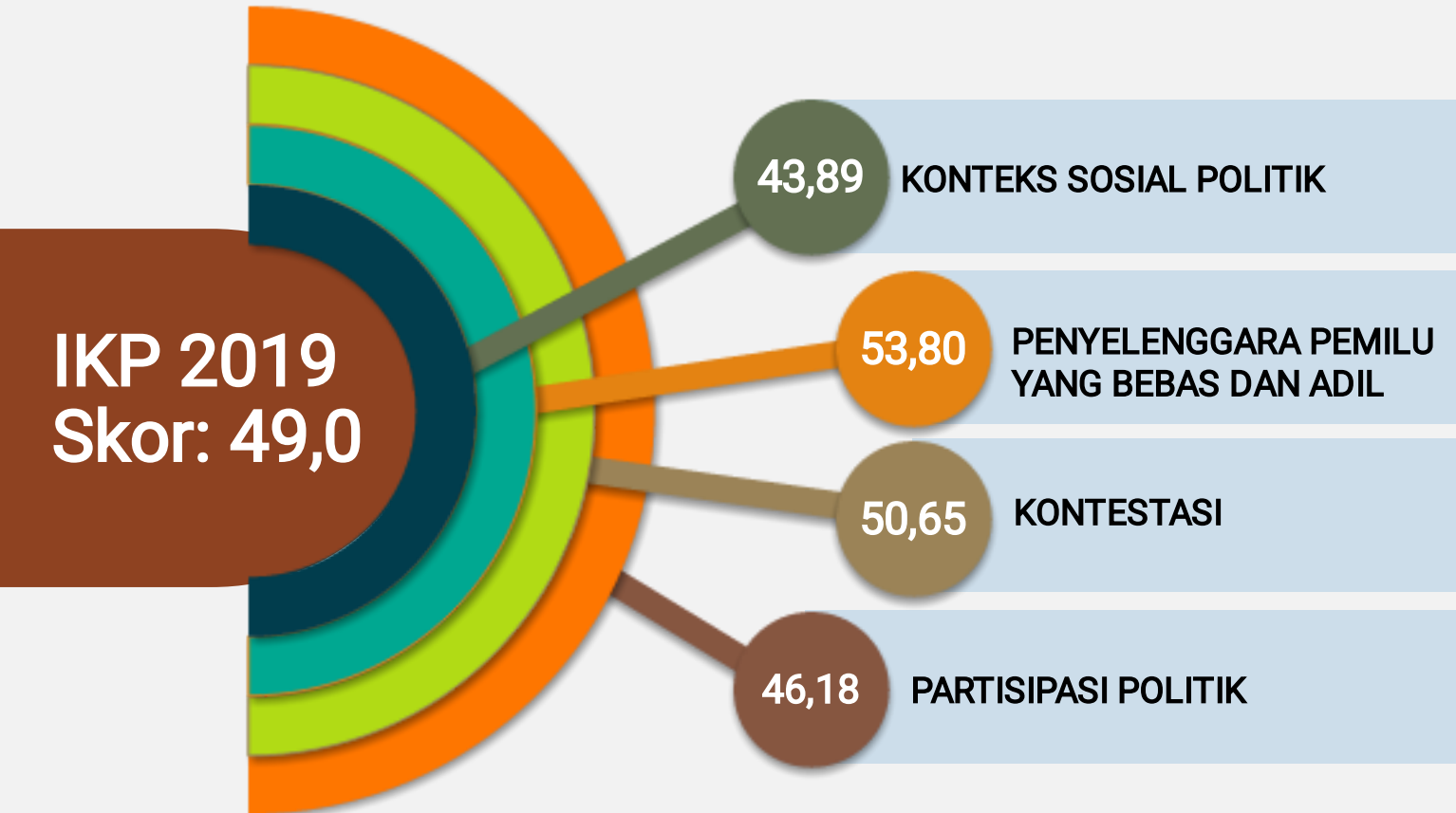
Kategori Skoring IKP 2019





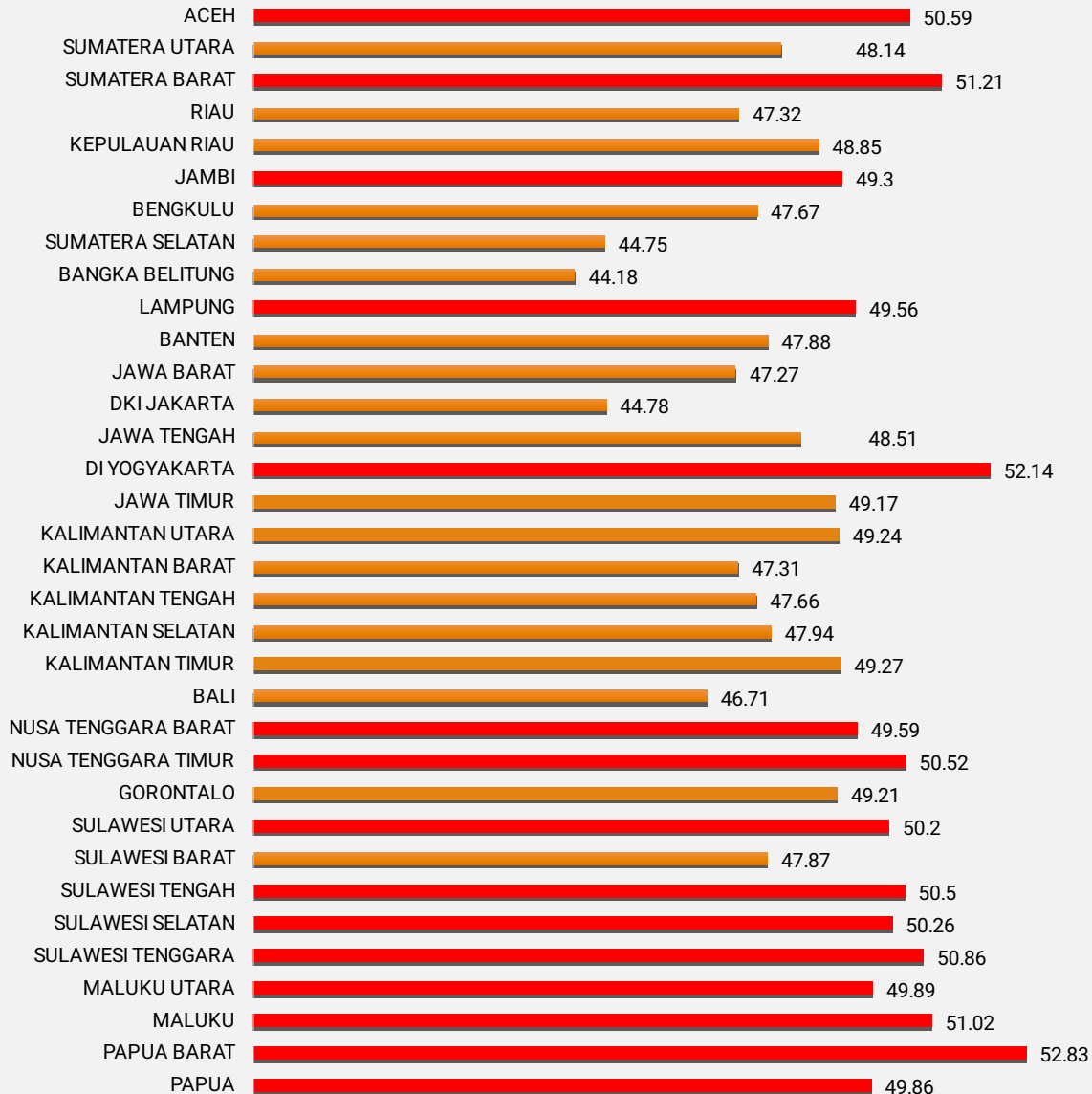
**Hasil Survey
Nasional
Bawaslu**

Basis Kerawanan Rata-Rata Nasional



Basis rata-rata kerawanan nasional adalah 49,00.

Angka tersebut adalah kumulasi agregatif dari 4 dimensi dari 514 kabupaten/kota.

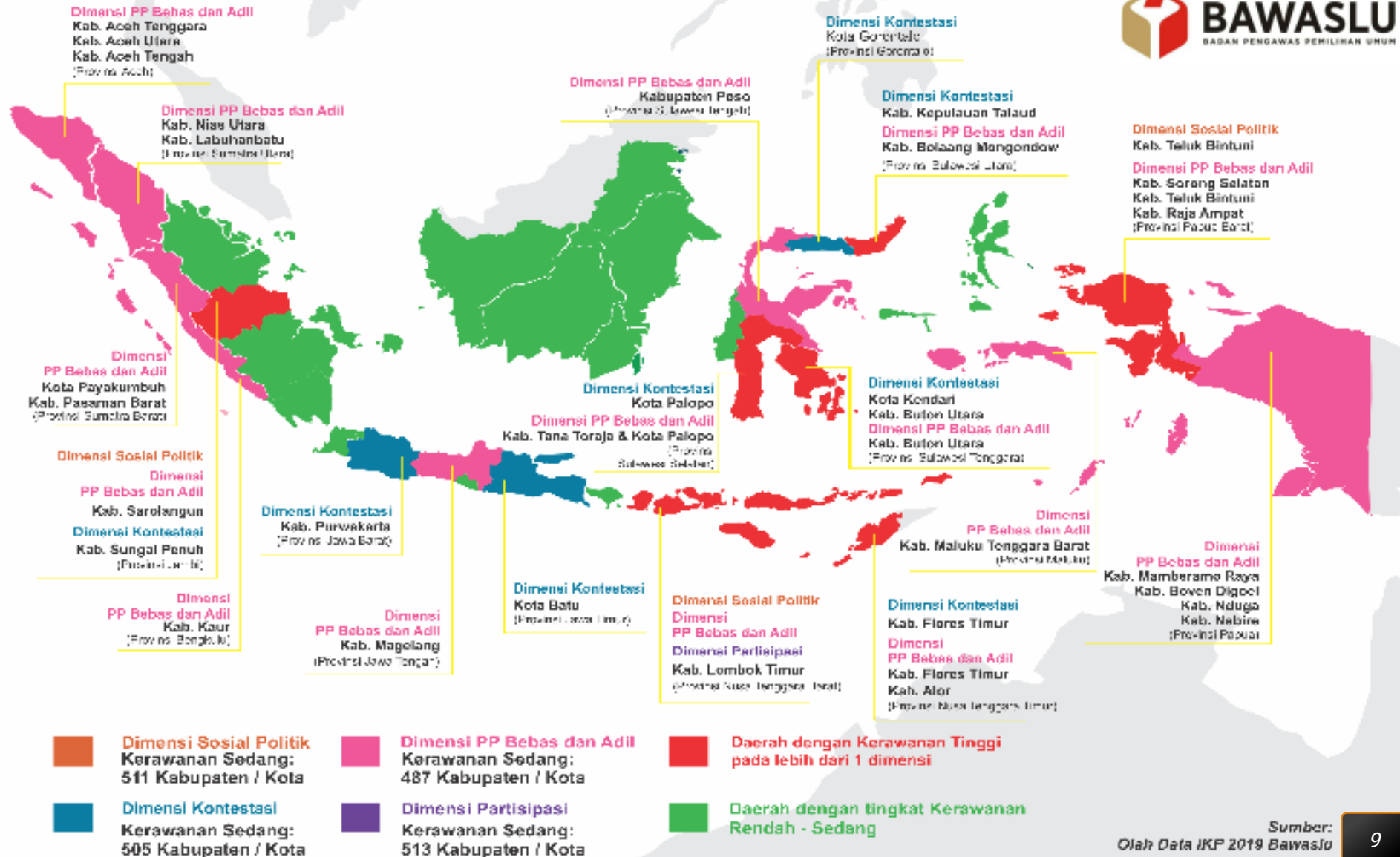


Provinsi dengan kerawanan di atas rata-rata nasional (15 Provinsi)

Berdasarkan Tahapan Pemilu 2019

Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

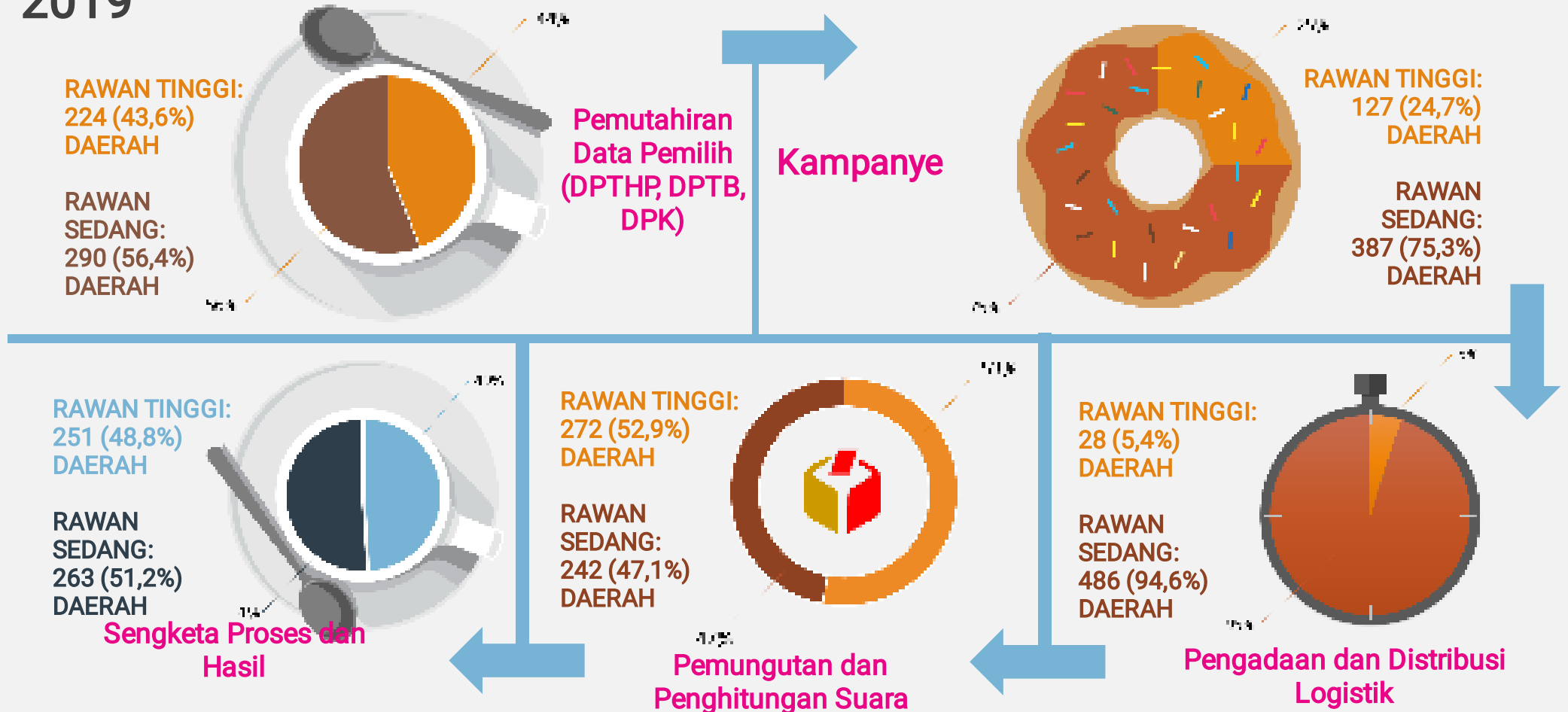
Daerah Rawan Tinggi Seluruh Dimensi



Daerah Rawan Tinggi Berdasarkan Tahapan Pemilu 2019



Daerah Rawan Tinggi Berdasarkan Tahapan Pemilu 2019



Skor IKP Kab/Kota

10 Kab/Kota kerawanan tertinggi

No.	Kab/Kota	Skor Dimensi Konteks Sosial Politik	Skor Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	Skor Dimensi Kontestasi	Skor Dimensi Partisipasi	IKP 2019
1	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	71.89	73.36	61.73	73.11	70.02
2	KABUPATEN TELUK BINTUNI	73.5	73.03	58.02	61.34	66.47
3	KABUPATEN BUTON UTARA	54.84	68.42	80.25	54.62	64.53
4	KABUPATEN SAROLANGUN	69.59	69.74	61.73	53.78	63.71
5	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	65.44	73.03	60.49	55.46	63.61
6	KABUPATEN FLORES TIMUR	48.62	75.99	71.6	57.14	63.34
7	KABUPATEN POSO	58.06	67.11	65.43	57.98	62.15
8	KABUPATEN DOGIYAI	60.6	63.49	65.43	57.98	61.88
9	KABUPATEN TANA TORAJA	55.99	70.72	61.73	57.98	61.61
10	KABUPATEN NIAS UTARA	56.68	67.11	62.96	58.82	61.39



Kerawanan Aspek: Keamanan, Netralitas ASN, Ujaran Kebencian dan Politisasi Sara



KEAMANAN
94 (18,3%) Kab/Kota

(Kondisi Sosial, Relasi
Kuasa Lokal, dan Praktik
Kampanye)



**UJARAN KEBENCIAN
DAN POLITISASI SARA**
90 (17,5%) KAB/KOTA



(Relasi Kuasa Lokal, Praktik
Kampanye dan Keterlibatan
Pemilih)




NETRALITAS ASN
93 (18,1%) KAB/KOTA





(Otoritas Penyelenggara
Pemilu, Penyelenggara Negara,
Relasi Kuasa Lokal dan
Pelibatan saat Kampanye)



Kerawanan Aspek: Politik Uang

 Kerawanan Tinggi 34,2%
176 Daerah

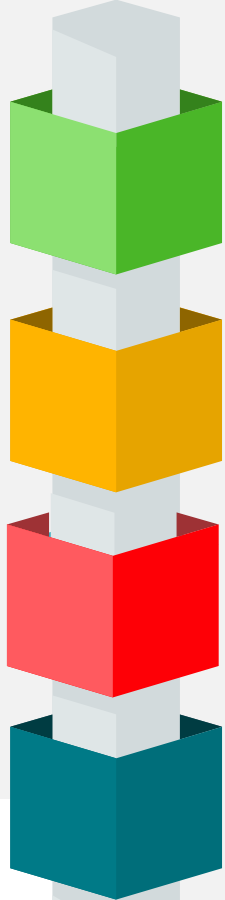
 Kerawanan Sedang 65,8%
337 Daerah

UNSUR 

Kampanye dan Partisipasi
Pemilih
Relasi Kuasa Lokal
Pelaksanaan Penghitungan
Pengawasan Pemilu dan Partisipasi
Suara Publik



Kesimpulan dan Rekomendasi



KPU - BAWASLU

Menjaga hak pilih dengan memaksimalkan pemutakhiran data pemilih, meningkatkan sosialisasi Pemilu dan menjamin keberimbangan kampanye peserta Pemilu.

KEMENDAGRI

Memaksimalkan perekaman KTP Elektronik hingga Desember 2018.

TNI / POLRI

Meningkatkan kondusivitas keamanan terhadap daerah yang rawan tinggi.

PARTAI POLITIK

Meningkatkan kampanye dialogis dalam bentuk pertemuan tatap muka dan pertemuan terbatas dan mematuhi aturan kampanye



Kesimpulan dan Rekomendasi



KEMENKOPOLHUKAM

Memastikan koordinasi dan pengendalian terhadap kondisi keamanan, sosial dan politik dalam tahapan Pemilu.



KEMENKOMINFO

Meningkatkan pengawasan dan penanganan materi kampanye di internet.



KEMENPANRB DAN KEMENTERIAN LAIN

Meningkatkan pengawasan terhadap potensi keterlibatan aparat sipil negara.



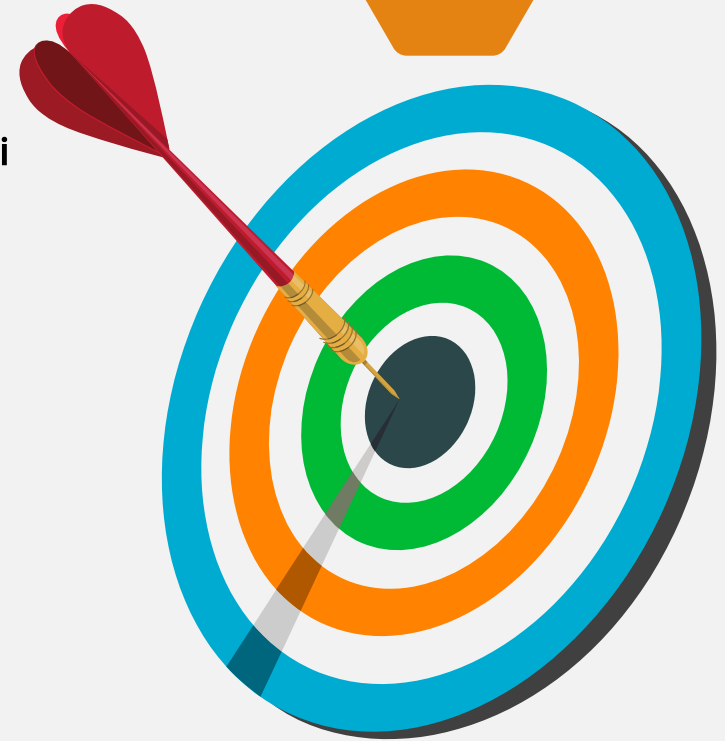
MEDIA

Menjaga kode etik jurnalistik, keberimbangan informasi dan meningkatkan edukasi pemilih.



MASYARAKAT SIPIL

Meningkatkan partisipasi pemantau dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan tahapan Pemilu.





Terima Kasih
Badan Pengawas Pemilihan
Umum